

**DIPLOMASI MULTILATERAL IRAN DALAM UPAYA PENCABUTAN SANKSI
DEWAN KEAMANAN PBB
(Pada Masa Presiden Hassan Rouhani)**

Oleh

Christian Adiyudha¹, Setyasih Harini², Halifa Haqqi³

Abstrack

The development of iran's nuclear program was the alternate way to fulfill the energy supply of Iran. With the development of nuclear, Iran government need to achieve national interest which is independency of energy for the people of Iran. Iran's effort to increase nuclear development made the security council of UN give the punishment for Iran nuclear program. With the international punishment, Iran government using diplomacy and negotiation to solve the nuclear problem. By using negotiation with P5+1 group, Iran hoping the nuclear program problem was being solve. With doing join negotiation between Iran and P5+1 group showing the commitment from Hassan Rouhani government to ending the program nuclear problem and to take the international punishment with agreement of conclusion on negotiation with P5+1 group. By using the national interest theory, diplomacy, and Multilateral diplomacy, the authors doing research on how the effort of Iran's multilateral diplomacy to take of UN Security Council punishment on the president Hassan Rouhani era. This research was conducted with a qualitative description of the approach and use data object Iran's multilateral diplomacy to take of UN Security Council punishment on the era of president Hassan Rouhani on 2013-2015. The analysis Technique of data is library research. The result of this research have conclusion Iran government still develop their nuclear program even got the punishment from UN Security Council, Iran government on Hassan Rouhani era by doing multilateral diplomacy with P5+1 group to take off the punishment UN Security Council, with the joint agreement between Iran and P5+1 group showing by multilateral diplomacy Iran can solve their nuclear problem with signing the JCPOA. The authors giving advice for the next authors to continuing about the problems of Iran Nuclear.

Key word : nuclear program, diplomacy, Iran

Pendahuluan

Pengembangan program Nuklir Iran pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi tahun 1957 sebagai salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Dengan adanya *US Atom for Peace*, Pemerintah Iran berkeinginan untuk mengembangkan teknologi nuklirnya dengan bantuan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman. Pengembangan program nuklir Iran sempat terhenti pengoperasiannya pada tahun 1979 karena pemerintahan Iran sedang mengalami konflik politik di dalam negerinya. Konflik dalam negeri Iran disebabkan ketidakpercayaan rakyat Iran terhadap pemimpin mereka, yaitu Shah Reza Pahlevi yang mengakibatkan terjadinya Revolusi untuk menggulingkan Pemerintahan Shah Reza Pahlevi. Dengan terbentuknya pemerintahan baru dan pergantian kepemimpinan di Iran, serta sikap yang ditunjukkan Pemerintahan baru

yang anti terhadap campur tangan barat maka Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menarik diri dan memutuskan hubungan kerjasama pengembangan program nuklir dengan pemerintah Iran.

Pada awalnya, negara barat menyetujui pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran. Namun ketika revolusi Iran terjadi, AS menarik diri dari program nuklir Iran dan menghentikan pasokan uraniumnya ke Iran. Pasca dihentikannya pasokan uranium dari AS hubungan dua negara ini menjadi kurang harmonis akibat semakin kuatnya semangat perjuangan rakyat Iran untuk menjadi negara mandiri yang menyuarakan sikap anti terhadap campur tangan barat. Pada masa awal revolusi yang dipimpin oleh Khomeini ini, kegiatan pengoperasian reaktor-reaktor nuklir yang dimiliki Iran dihentikan pengoperasiannya.

Program nuklir Iran kemudian mulai dikembangkan kembali pada masa Presiden Rafsanjani dan Presiden Khatami. Pada

¹ Penulis

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

masa Rafsanjani dengan adanya perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988 pemerintah Iran mulai mengembangkan nuklirnya kembali. Pemerintah Iran khawatir dalam perang tersebut Irak akan menyerang negaranya dengan menggunakan senjata nuklir maka untuk mengimbangi kekuatan Irak maka pemerintah Iran memulai kembali program nuklirnya yang sempat berhenti beroperasi. Pada masa pemerintahan Presiden Khatami program nuklir Iran juga mengalami perkembangan akan tetapi dengan semakin kuatnya tekanan dari barat maupun Internasional untuk menekan Iran agar tidak menjalankan dan mengembangkan program nuklirnya, maka pemerintah Iran mulai berhati-hati dan mau untuk bekerjasama secara kooperatif dalam mengembangkan nuklirnya.

Pada masa kepemimpinan Presiden Ahmadinejad, pengembangan nuklir dijadikan prioritas utama walaupun mendapat tekanan dari barat, Presiden Ahmadinejad berani mengambil resiko dengan tetap menjalankan program nuklir Iran untuk mencapai kemandirian energi bagi kepentingan rakyat Iran. Keinginan Presiden Ahmadinejad dalam mengembangkan nuklir Iran sendiri sudah disuarakan saat memenangi pemilihan Presiden Iran pada 5 Agustus 2005. Sejak dipimpin oleh Presiden Ahmadinejad Iran telah berhasil melakukan pengayaan uranium untuk pertama kalinya di Natanz, bahkan Iran mampu memproduksi dan siap menjadi eksportir uranium. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesar dari program nuklir Iran yang sudah sejak lama dikembangkan (Rajagopalan dan Biswas, 2015: 83-84).

Dengan sikap yang ditunjukkan Iran dan kurang terbukanya Iran dalam memberikan keterangan secara jelas terhadap IAEA tersebut maka, Amerika Serikat dan sekutunya mencurigai bahwa program nuklir tersebut sebenarnya untuk menutupi pengembangan bom nuklir yang dapat membahayakan dunia. Melalui laporan dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)* yang membuktikan bahwa Iran tidak bersikap kooperatif dalam menjalankan program nuklirnya maka Dewan Keamanan PBB(DK-PBB) menjatuhkan sanksi terhadap program nuklir Iran melalui resolusi 1696, resolusi 1737, resolusi 1747, resolusi 1803, resolusi 1835

dan resolusi 1929. Dengan dijatuhkannya sanksi internasional melalui resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pemerintah Iran untuk segera menghentikan program nuklir yang sedang dikembangkan dan segera bersikap kooperatif terhadap IAEA untuk menyelesaikan permasalahan program nuklir Iran.

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Ahmadinejad pada 14 Juni 2013 Iran melaksanakan Pemilihan Umum untuk mencari presiden baru. Dengan hasil kemenangan mutlak Hassan Rouhani memenangkan pemilihan umum Iran. Pasca terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran yang baru, Presiden Rouhani menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat dan untuk memulihkan perekonomian Iran yang hancur akibat sanksi-sanksi Internasional yang dijatuhkan akibat pengembangan nuklir Iran. Dengan melakukan pendekatan secara diplomatis Presiden Rouhani membuka kembali pembicaraan dan perundingan dengan barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya dan dengan dibukanya kembali perundingan dengan barat Presiden Rouhani berharap sanksi-sanksi yang dijatuhkan dapat dicabut dan dengan dicabutnya sanksi internasional berharap akan memperbaiki perekonomian Iran.

Dengan keinginan menyelesaikan permasalahan nuklirnya maka pemerintah Iran mengadakan perundingan dengan kelompok P5+1 yang beranggotakan AS, Prancis, Rusia, Inggris, China dan Jerman untuk membahas program pengembangan nuklir Iran. Disisi lain Iran yang mendapatkan sanksi-sanksi internasional perlu segera menyelesaikan permasalahan nuklirnya untuk memperbaiki perekonomian Iran yang jatuh. Pemerintah Iran sendiri juga menginginkan pengakuan secara legal mengenai haknya sebagai negara Nuklir untuk diperbolehkan pengembangan nuklirnya bagi kepentingan nasionalnya.

Iran yang memiliki cadangan minyak terbanyak di dunia setelah Arab Saudi dan cadangan gas terbesar setelah Rusia harusnya tidak perlu untuk mengembangkan nuklirnya karena dengan kelebihan Iran dalam memiliki sumber daya alam tersebut, Iran akan mampu memenuhi kebutuhan

energi bagi negaranya tanpa perlu mengembangkan nuklir. Dengan jatuhnya sanksi-sanksi yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian Iran, maka pemerintah Iran perlu melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya. Untuk mengetahui bagaimana Diplomasi Multilateral Iran Dalam Upaya Pencabutan Sanksi Dewan Keamanan PBB Pada Masa Presiden Hassan Rouhani. Perlu dikaji dengan teori kepentingan nasional untuk memahami bagaimana Iran mengembangkan nuklirnya yang bertujuan untuk kepentingan nasional negaranya. Dengan menggunakan teori diplomasi dan diplomasi multilateral mampu memahami negosiasi dan perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Iran dalam menyelesaikan permasalahan nuklirnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah diplomasi multilateral Iran dalam upaya pencabutan sanksi Dewan Keamanan PBB pada masa Presiden Hassan Rouhani tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan mengumpulkan semua data atau informasi secara tidak langsung yang diperoleh dari, literatur, buku, dokumen, artikel, jurnal, surat kabar, dan informasi yang diakses dari internet. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Studi Pustaka (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori dan dikaitkan dengan pembahasan yang diteliti kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992: 16-19)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum terjadinya revolusi Islam Iran, negara-negara barat memandang Iran sebagai mitra untuk mengembangkan teknologi di kawasan Timur Tengah, salah satu teknologi yang ingin dikembangkan yaitu energi nuklir. Pada awalnya negara-negara barat menyetujui dan membantu pemerintah Iran dalam mengembangkan program nuklir yang digagas oleh Sheh Mohammad Reza Pahlevi untuk kepentingan damai. Diawal pengembangannya, pemerintah Iran memiliki

banyak mitra untuk diajak bekerjasama mengelola program nuklir antara lain Jerman, Inggris dan Prancis. Bahkan Amerika Serikat yang menyarankan dan menawarkan nuklir untuk dikembangkan Iran. Akan tetapi, ketika kekuasaan Sheh Reza Pahlevi jatuh akibat terjadinya Revolusi Iran 1979 yang mengantarkan pemerintahan Islam Iran yang baru, negara-negara barat perlahan mulai menarik diri dari kerjasama yang telah dilakukan dengan Iran dalam mengembangkan nuklirnya. Karena sikap pemerintah baru Iran yang cenderung anti terhadap barat maka program nuklir setelah terjadinya Revolusi tidak dapat dilanjutkan kembali.

Negara-negara barat pada awalnya mendukung penuh program pengembangan nuklir Iran untuk kepentingan damai. Setelah terjadinya revolusi Iran, dukungan dari negara-negara barat semakin berkurang bahkan dapat dikatakan berakhir. Sejak keberhasilan revolusi Iran 1979 yang menandakan berakhirnya kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlevi, negara-negara barat khususnya Amerika Serikat mulai menarik diri terhadap bantuan pengembangan program nuklir Iran yang telah berjalan. Dengan sikap tegas dan anti terhadap campur tangan asing semakin membuat pemerintah baru Iran semakin menjadi musuh bagi negara barat khususnya Amerika Serikat. Berbagai tuduhan yang diberikan kepada pemerintah baru Iran mengakibatkan dikucilkannya Iran dalam masyarakat Internasional. Untuk menekan pemerintahan Iran yang baru, negara-negara barat khususnya Amerika Serikat mengangkat berbagai macam isu yang dituduhkan kepada Iran antara lain terorisme, program pengembangan senjata nuklir dan militer, serta sikap anti terhadap proses perdamaian di yang berlangsung di Timur Tengah. (Rahman, 2003, 155)

Sikap dan Sanksi Internasional

Sikap Amerika Serikat terhadap permasalahan program nuklir Iran sangat berbeda dengan masa dimana Shah Reza Pahlevi masih berkuasa. Amerika Serikat yang pada awal pengembangan program nuklir Iran memiliki peran besar dalam membantu Iran mengembangkan nuklirnya, dengan adanya kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas, Amerika Serikat tertarik untuk membantu Iran. Setelah

pemerintah Sheh Reza Pahlevi mengalami kejatuhan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran, Amerika Serikat menarik diri dari berbagai kerjasama dengan pemerintahan Iran yang salah satunya program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran. Melalui bergantinya pemerintah Iran yang baru cenderung berseberangan sikap dengan barat semakin membatasi pengaruh Amerika Serikat di Iran.

Dalam upaya menghentikan program pengembangan nuklir Iran, Amerika Serikat mengangkat dan memanfaatkan kasus serpihan radiasi dari salah satu reaktor nuklir di Iran utara pertengahan Juli 1996 yang mengakibatkan tekanan politik bagi Iran. Selain menekan Iran, Amerika Serikat juga menekan negara lain yang bekerjasama dengan Iran salah satunya Rusia yang saat itu sedang bekerjasama dengan Iran untuk merampungkan membangun reaktor di Bushehr. Upaya Amerika Serikat untuk menekan Rusia sebenarnya berhasil akan tetapi Rusia mengabaikan larangan dan melanjutkan kembali kerjasamanya untuk menyelesaikan reaktor di Bushehr. Dengan upaya Iran yang semakin meningkatkan program nuklirnya maka Amerika Serikat dan sekutunya semakin menekan Iran hingga memberi sanksi ekonomi kepada negara atau perusahaan yang membantu dalam mengembangkan program nuklir Iran. (Rahman, 2003, 205-206)

Dengan sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat kepada Iran, menunjukkan bahwa Amerika Serikat khawatir terhadap program nuklir yang dikembangkan oleh pemerintah Iran yang baru. Dengan melihat kemajuan dan perkembangannya nuklir Iran, Amerika Serikat semakin menaruh perhatian terhadap permasalahan nuklir Iran dengan meminta Iran membatasi dan meminta menghentikan program nuklirnya secara permanen. Sikap tidak percaya Amerika Serikat diikuti pula oleh Uni Eropa khususnya Inggris, Prancis dan Jerman (UE-3) pada awal pengembangan sangat antusias dalam membantu Iran mengembangkan nuklirnya. Dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Iran dengan Jerman dan Prancis dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr, Isfahan dan Saveh yang dibangun oleh Jerman dan di Karun yang dibantu Prancis. UE-3 berharap dalam penyelesaian permasalahan pengembangan

nuklir Iran, lebih baik diselesaikan melalui jalur diplomasi dan negosiasi (Ansari, 2008, 231). Karena sikap Iran yang kurang terbuka maka UE-3 bersama dengan Amerika Serikat melibatkan diri dalam menghadapi program pengembangan nuklir yang dijalankan Iran. (Ansari, 2008, 231-250).

Sikap yang ditunjukkan Rusia dan China berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara barat. Rusia sebenarnya memiliki sejarah yang kurang harmonis dengan Iran, terbukti dengan perbedaan dukungan dalam permasalahan wilayah Azerbaijan, konflik di Afganistan dan dukungan kepada Irak dalam perang Irak-Iran membuat hubungan Iran dengan Rusia selalu dilandasi sikap yang kurang percaya. Akan tetapi setelah tahun 1989, hubungan Iran dengan Rusia mengalami kedekatan karena memiliki alasan sama yaitu kesamaan misi melawan barat, kerjasama yang saling menguntungkan, dan Rusia yang menjadi pemasok kebutuhan militer Iran semakin mempererat hubungan anatar Iran dan Rusia. Ketertarikan Rusia untuk membantu Iran dibuktikan dengan disetujuinya kerjasama Rusia-Iran dalam menyelesaikan pembangunan dua pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di Bushehr. Dengan memberikan bantuan dalam pembangunan pembangkit listrik, Rusia menjadi mitra terdekat Iran dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri Iran bahkan kebutuhan militer Iran sering mendapatkan pasokan dari Rusia.

Seiring berjalan waktu program nuklir Iran semakin menunjukkan kemajuan, keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Iran semakin membuat program nuklir Iran mendapatkan tekanan. Dengan hasil peninjauan IAEA akhirnya Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) menjatuhkan sanksi kepada Iran dengan mengeluarkan resolusi 1696 (31 Juli 2006). Melalui resolusi tersebut Pemerintah Iran diminta segala melaporkan aktivitas nuklirnya kepada IAEA, DK-PBB juga menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran dalam mengembangkan program nuklir dan memerintahkan Iran untuk mengikuti tahapan diplomatis mengenai verifikasi kebenaran program nuklir bertujuan damai. Akan tetapi sanksi yang dijatuhkan oleh DK-PBB melalui Resolusi 1697 tidak dilaksanakan oleh Iran

dengan baik akhirnya DK-PBB merancang resolusi baru yang lebih berat.

Pada bulan Desember 2006, dalam sidang DK-PBB yang ke 5612 memutuskan untuk memberlakukan Resolusi 1737 yang setuju oleh 15 anggota DK-PBB. Dengan disetujuinya resolusi tersebut pemerintah Iran diminta untuk segera menghentikan pengembangan kegiatan nuklirnya termasuk penelitian, pengembangan, dan pembangunan reaktor nuklir. Resolusi ini juga mewajibkan Iran untuk diawasi secara ketat oleh IAEA terhadap seluruh aktifitas nuklir yang dijalankan oleh Pemerintah Iran yang kemudian akan diverifikasi oleh IAEA untuk memberikan laporan mengenai apakah Iran telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diharuskan dalam Resolusi sesuai jangka waktu 60 hari. Dalam resolusi ini juga dicantumkan nama perusahaan, instansi, maupun individu yang diduga terlibat dalam pengembangan program nuklir Iran, Resolusi 1737 juga menerangkan bahwa DK-PBB akan menjatuhkan sanksi berupa pelarangan aktifitas ke semua negara yang melakukan pasokan, penjualan maupun transfer material yang digunakan dalam membantu program nuklir Iran, dan Dewan Keamanan juga akan membekukan aset finansial dari semua perusahaan yang memiliki keterlibatan dalam membantu Iran mengemabangkan program nuklirnya.

Pada tahun 2007 Dewan Keamanan PBB(DK-PBB) menilai Iran tidak menerapkan resolusi-resolusi sebelumnya, maka dari itu DK-PBB menjatuhkan sanksi baru yang lebih ketat melalui resolusi 1747. Resolusi ini meminta Iran segera menghentikan kegiatan pengayaan, termasuk penelitian dan pengembangan, kemudian Iran diminta untuk diawasi oleh IAEA. Dewan Keamanan juga meminta agar IAEA segera menyerahkan laporan mengenai penghentian kegiatan pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran dalam jangka waktu 60 hari. Resolusi 1747 menjelaskan mengenai penghentian kegiatan pengayaan oleh Iran sebagaimana tercantum dalam resolusi sebelumnya yaitu 1737. Dengan resolusi ini DK-PBB menekan Iran untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan nuklir sekaligus memberikan jaminan bahwa program nuklir Iran dikembangkan dengan tujuan damai. Berkaitan dengan hal tersebut,

Dewan Keamanan juga menekankan pentingnya peran komunitas Internasional dalam membantu menyelesaikan permasalahan nuklir dengan melakukan komunikasi yang aktif dengan Iran

Pada bulan Maret 2008 Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) kembali mengeluarkan resolusi 1803 yang disetujui oleh 14 negara dan 1 negara menyatakan abstain. Resolusi ini memutuskan bahwa Iran diharuskan menghentikan segala kegiatan pengayaan uraniumnya sesuai penjelasan paragraph 2 pada resolusi 1737. Resolusi 1803 ini merupakan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) untuk memperberat penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Iran akibat menolak penghentian kegiatan perkembangan program nuklir. Dewan Keamanan juga meminta kepada semua negara untuk memberlakukan pengawasan secara ketat terhadap bahan baku maupun material yang digunakan dalam kegiatan pengayaan nuklir atau persenjataan nuklir disekitar wilayahnya yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan Iran. Selain itu, Dewan Keamanan memperpanjang masa pembekuan aset-aset milik perorangan maupun institusi yang mendukung kegiatan yang terkait dengan program nuklir Iran salah satunya bank-bank yang dicurigai terlibat dalam kegiatan pengembangan nuklir. Bahkan semua negara diminta untuk tidak memberikan kredit, jaminan ataupun asuransi kepada Pemerintah Iran. Pada tanggal 5 Juli 2008 Iran pun sedikit melunak setelah merespon terhadap usulan yang ditawarkan oleh kelompok P5+1. Pada sisi lain, aktifitas nuklir Iran terus berlanjut hingga DK-PBB membujuk Iran dengan menegaskan bahwa DK-PBB tidak akan mengeluarkan resolusi baru apabila Iran mematuhi tiga resolusi sebelumnya. Penegasan Dewan Keamanan PBB tersebut akhirnya dituangkan dalam resolusi barunya yang bernomer 1835 yang telah disepakati dalam Sidang Dewan Keamanan PBB.

Dengan jatuhnya sanksi-sanksi internasional, pemerintah Iran semakin tidak patuh pada resolusi DK-PBB dengan tetap menjalankan program nuklirnya. Pada 9 Juni 2010 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi baru yang memperingatkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Resolusi bernomer 1929 menjadi resolusi baru yang dijatuhkan

kepada pemerintah Iran karena tidak mau mematuhi resolusi sebelumnya (www.politik.lipi.go.id). Sanksi yang tertuang dalam resolusi 1929 berisikan larangan perdagangan senjata berat kepada Iran, seperti helikopter perang dan rudal. Pemerintah Iran juga diminta untuk mengizinkan inspeksi terhadap kapal-kapal kargo yang dicurigai membawa material yang dilarang yang akan berlayar menuju Iran.

Dengan berbagai sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Pengembangan nuklir Iran semakin menyudutkan Pemerintahan Iran dalam mengembangkan nuklirnya. Bagi Iran sanksi-sanksi tersebut dianggap semakin memperburuk proses penyelesaian terhadap program nuklirnya. Sikap Iran bersikeras tetap mengembangkan nuklirnya didasari bahwa Iran telah menjadi anggota NPT dan menganggap Iran bebas dalam mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan damai sesuai NPT, pemerintah Iran dalam menjalankan perundingan juga meminta semua negara untuk mengakui hak-hak Iran sebagai negara nuklir sesuai aturan NPT dan meminta dalam proses perundingan Iran harus ditempatkan sejajar dengan negara-negara lain dalam haknya mengelola nuklir.

Dengan diberlakukannya sanksi-sanksi Internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap program nuklir Iran semakin menyebabkan terpuruknya perekonomian Iran, setelah diberlakukannya sanksi-sanksi tersebut berbagai negara menyikapinya dengan melakukan sanksi-sanksi terhadap pemerintah Iran seperti yang ditunjukkan oleh Uni Eropa melakukan serangkaian sanksi dan embargo yang menjatuhkan sektor ekonomi Iran yaitu berupa larangan kerja sama dengan bank, asuransi dan penanaman modal asing dalam sektor gas dan minyak bumi Iran. Uni Eropa meyakini bahwa Iran telah melakukan pengembangan nuklir yang telah mencapai pada pembuatan bom nuklir yang akan mengancam Dunia. Sanksi ekonomi yang dilakukan Uni Eropa telah menpegaruhi perekonomian Iran. Embargo minyak dengan cepat menurunkan produksi dan transaksi ekspor minyak Iran.

Dengan jatuhnya Iran dalam sanksi-sanksi Internasional tidak membuat

Pemerintah Iran mundur dalam mengembangkan nuklirnya. Pemerintah Iran tetap mengupayakan diplomasi untuk meringankan dan mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Keteguhan Iran untuk meyakinkan bahwa program nuklir yang dikembangkannya hanya ditujukan untuk kepentingan energi dan ilmu pengetahuan tidak dapat merubah pandangan dari negara-negara untuk mencabut sanksi ekonominya. Dengan semakin besarnya perhatian dunia terhadap penyelesaian permasalahan nuklir Iran semakin membuat keprihatinan untuk segera menyelesaikannya secara tepat dan saling menguntungkan.

Diplomasi Multilateral Iran

Jatuhnya sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap program nuklir Iran menyebabkan jatuhnya perekonomian Iran. Embargo ekonomi yang ditujukan kepada Iran semakin menyebabkan diasingkannya Iran dalam politik global. Dengan tetap menjalankan program nuklirnya pemerintah Iran menyakinkan kepada masyarakat Internasional bahwa program nuklir Iran ini bertujuan untuk kepentingan damai dan tidak untuk dikembangkan sebagai senjata nuklir. Berakirnya kekuasaan Presiden Ahmadinejad memberikan pekerjaan rumah yang berat bagi penerusnya. Pekerjaan berat untuk memulihkan keadaan Iran agar terbebas dari sanksi Internasional.

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden baru Iran memberikan harapan baru dalam permasalahan nuklir Iran. Presiden Hassan Rouhani berupaya menunjukkan sikap yang lebih terbuka dalam pengembangan nuklirnya agar dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Presiden Hassan Rouhani juga berupaya mencabut sanksi-sanksi yang didapat Iran dengan menjalin hubungan baik dengan barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Dengan sikap yang lebih terbuka dengan penyelesaian masalah secara diplomatis dalam permasalahan program nuklirnya mempermudah dalam mencapai kata damai dalam program nuklir Iran dan segera diikuti pencabutan sanksi-sanksi yang memperburuk perekonomian Iran.

Presiden Hassan Rouhani ini memberikan harapan baru untuk terciptanya kesepakatan dan penyelesaian mengenai program nuklir Iran yang telah lama menjadi perhatian bagi masyarakat Internasional. Sikap terbuka Iran saat ini sangat berbanding terbalik dengan masa Presiden Ahmadinejad yang lebih keras dan mengabaikan semua sanksi yang didapat Iran sehingga Iran mengalami keterpurukan akibat hal tersebut. Dengan pendekatan secara dipomatis yang dilakukan oleh Presiden Hassan Rouhani ini, masyarakat Internasional mulai merespon sikap Iran dengan mengapresiasi sikap Iran yang mau memulai kembali perundingan nuklirnya.

Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Iran untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya maka pada Pada 27 September 2013 Presiden Rouhani menghadiri Sidang Umum PBB yang dilaksanakan di New York. Disela sidang umum PBB Pemerintah Iran yang diwakili oleh menteri luar negerinya yaitu Menlu Javad Zarif melakukan pertemuan dengan perwakilan dari China, Rusia, Amerik Serikat, Prancis, Inggris dan Jerman yang sering disebut dengan kelompok P5+1 untuk membicarakan keseriusan Iran dalam menyelesaikan permasalahan nuklirnya. Pemerintah Iran yang awalnya sangat tertutup dan anti terhadap campur tangan barat terhadap permasalahan program nuklirnya perlahan-lahan mulai diubah terbuka dan kooperatif dibawah kepemimpinan Presiden Hassan Rouhani. Sikap Presiden Hassan Rouhani yang memulai kembali perundingan dengan barat semakin meningkatkan kepercayaan Internasional atas penyelesaian permasalahan nuklir Iran.

Keseriusan Iran untuk menyelesaikan permasalahan atas program nuklirnya kembali dibuktikan dengan melaksanakan perundingan pada 15-16 Oktober 2013 yang bertempat di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menindak lanjuti kesepakatan yang diambil oleh pemerintah Iran dan kelompok P5+1 pada September lalu di New York untuk segera menyelesaikan masalah nuklir Iran di meja perundingan. Pertemuan Jenewa antara pemerintah Iran dengan kelompok P5+1 memulai babak baru bagi permasalahan program nuklir Iran. Pada pertemuan ini Iran diwakili oleh Menlu Javad Zarif menyampaikan proposal program nuklir

Iran kepada negara-negara yang tergabung dalam kelompok P5+1. Proposal yang disampaikan oleh juru runding Iran berisi penetapan batasan-batasan pengembangan nuklir yang boleh dilakukan Iran dengan konsekuensi yang akan diterima, akan tetapi barat harus mengakui hak Iran untuk memperkaya uranium sebagai negara nuklir. Didalam proposal tersebut pemerintah Iran berharap kepada barat untuk segera mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan atas program nuklir Iran khususnya terkait perbangan dan industri minyak Iran.

Menanggapi usulan dari pemerintah Iran yang tertuang dalam proposal nuklir Iran ditanggapi dengan baik oleh pihak barat, bagi barat usulan yang disampaikan delegasi Iran sebagai sebuah partisipasi penting bagi terciptanya kesepakatan mengenai permasalahan nuklir Iran. Juru runding barat yang diwakili oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton menyambut baik usulan yang disampaikan dengan mengapresiasi langkah Pemerintah Iran dalam menyelesaikan permasalahan nuklirnya (indonesian.tribe.ir). Melalui pertemuan ini delegasi dari kedua belah pihak menyetujui untuk segera melaksanakan perundingan kembali mengenai nuklir Iran yang akan dilaksanakan pada 7-9 November 2013 di Jenewa, Swiss. Dengan semakin kooperatifnya Pemerintah Iran dalam berunding dengan kelompok P5+1 membuktikan Iran siap untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan nuklirnya. Sikap pemerintah Iran untuk segera menyelesaikan permasalahan nuklirnya mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Internasional, dimulainya kembali perundingan dengan barat Pemerintah Iran semakin berharap adanya hasil yang baik untuk menyelesaikan permasalahan mengenai program nuklir Iran.

Untuk melanjutkan diplomasi multilateral Pemerintah Iran dan kelompok P5+1 melanjutkan kembali perundingan yang membahas tentang nuklir Iran pada tanggal 7-9 November 2013 di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini pemerintah Iran menyiapkan usulan tiga tahap dalam membicarakan permasalahan nuklir Iran, pemerintah Iran mengajukan paket usulan tiga tahap untuk lebih menguatkan

komitmen barat maupun Iran untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya. Paket usulan ini apabila disetujui pada tahap awal akan disepakati bahwa tiap-tiap perwakilan teriat komitmen untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Bagi pemerintah Iran pada tahap awal ini akan menjadi dasar dari dalam menyelesaikan permasalahan nuklir pada tahap-tahap berikutnya. Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa akan membatasi produksi uraniumnya sebesar 20% dengan imbalan Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai memangkas sanksi yang diberikan kepada Iran terkait program nuklirnya. Dengan melihat tuntutan dari Iran maka perwakilan dari kelompok P5+1 berjanji akan melanjutkan perundingan kembali 10 hari kemudian. Tidak tercapainya kesepakatan resmi antara Menlu Iran dan Menlu kelompok P5+1 selama berlangsungnya perundingan membuat tidak adanya kesepakatan yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan nuklir Iran.

Setelah gagalnya perundingan di Jenewa tanggal 7-9 November, Menlu Iran Javad Zarif kembali melakukan perundingan dengan Menlu kelompok P5+1 untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran. Pada tanggal 20 November 2013 tim negosiator Iran melakukan pertemuan kembali guna berunding dengan kelompok P5+1 untuk melanjutkan kembali pembahasan mengenai permasalahan program nuklir Iran. Perundingan ini berjalan dengan sedikit lambat akibat sulitnya mendapatkan titik temu untuk menyepakati program nuklir antara Iran delegasi Iran dengan kelompok P5+1. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak yaitu Iran maupun kelompok P5+1 sudah memasuki pembahasan yang lebih dalam terhadap program nuklir Iran.

Negosiasi antara Iran dan Kelompok P5+1 pada tanggal 20 November di Jenewa telah memasuki tahapan yang lebih mendalam terhadap persoalan nuklir. Kedua belah pihak akhirnya menandatangani kesepakatan sementara yang dinamakan *Joint Plan of Action (JPOA)*. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 24 November tersebut berisi tentang pengakuan terhadap program nuklir Iran oleh Kelompok P5+1. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam *Joint Plan of Action (JPOA)* tersebut, Iran diwajibkan menghentikan kegiatan pengayaan

uraniumnya dalam jangka waktu 6 bulan, uranium yang dihasilkan oleh Iran juga harus diencerkan hingga batas pengayaan maksimal sebesar 5%, Iran juga dilarang membangun instalansi sentrifugal baru yang digunakan untuk pengayaan uranium dan mengizinkan IAEA untuk menginspeksi reaktor nuklir Iran. Dengan kesepakatan yang dicapai ini pihak barat berjanji akan melongarkan sanksi yang diterima Iran dan akan mencabut embargo maupun sanksi terhadap minyak bumi dan logam mulia dari Iran.

Sebagian golongan di Iran sebenarnya tidak begitu optimis dengan adanya niatan Presiden Hassan Rouhani untuk melaksanakan perundingan dengan Barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Melihat dari adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan ketidak seriusan Barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Tetapi dengan adanya perundingan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari semangat rakyat Iran untuk tetap mengembangkan nuklirnya menghadapi arogansi dunia dan tekanan-tekanan politik dari barat. Dengan kesepakatan nuklir sementara antara Iran dan Kelompok P5+1 dapat dinilai sebagai hasil dari diplomasi efektif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Iran untuk segera mendapatkan kesepakatan untuk mencabut sanksi-sanksi Internasional.

Setelah adanya kesepakatan *Joint Plan of Action (JPOA)* pada bulan November 2013, pemerintah Iran bersiap untuk segera melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Pemerintah Iran mulai tanggal 20 Januari 2014 akan memberikan akses seluas-luasnya terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Perundingan antara pemerintah Iran dan Kelompok P5+1 kembali dilanjutkan pada 18 Februari 2014 di Wina, Austria. Dalam perundingan kali ini Kelompok P5+1 masih meminta Iran untuk segera membatasi kegiatan nuklirnya, Iran juga diminta untuk segera membatasi jumlah mesin sentifugalnya bahkan Iran diminta untuk mengganti reaktor air berat yang dimilikinya untuk diubah ke air ringan. Menanggapi tuntutan Kelompok P5+1 tersebut pemerintah Iran akan bekerja kooperatif dalam melaksanakan tuntutan tersebut dengan imbalan pencabutan segera

sanksi-sanksi yang diterima oleh Iran. Dalam perundingan ini tidak ada kesepakatan yang disetujui untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Tapi dalam perundingan ini disepakati bahwa perundingan akan dilanjutkan kembali pada bulan Juli bersamaan dengan berakhirnya batasan waktu dalam JPOA.

Keseriusan pemerintah Iran untuk mencabut sanksi internasional dengan melakukan diplomasi multilateral dibuktikan kembali dengan melaksanakan perundingan pada 2-19 Juli 2014 di Wina, Austria. Perundingan ini melanjutkan kembali kesepakatan nuklir yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. dalam perundingan ini disepakati bahwa perundingan nuklir ini akan dilanjutkan oleh kedua belah pihak dengan deadline bulan November. Kedua belah pihak juga mengumumkan tindakan tambahan yang akan diambil oleh kedua belah pihak yaitu, Iran akan mengkonversi bubuk uranium yang diperkaya menjadi 2% dengan imbalan Kelompok P5+1 akan memulangkan dana Iran yang berada diluar negeri sebesar 2,8 miliar dolar (www.armscontrol.com). Pada 5 September 2014, IAEA mengeluarkan hasil dari inspeksinya terhadap Iran dan menyampaikan bahwa Pemerintah Iran menunjukkan sikap yang terbuka dan mematuhi kesepakatan dengan baik. Dengan adanya perkembangan positif dan sikap yang ditunjukkan Pemerintah Iran tersebut semakin menguatkan akan terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan atas permasalahan nuklir Iran.

Pada bulan September 2014, perwakilan Iran bertemu kembali dengan Kelompok P5+1 untuk melanjutkan perundingan mereka di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Kedua belah pihak mengatakan bahwa perundingan ini menghasilkan sedikit kemajuan yang dibuat di ujung pembicaraan. Perundingan kedua belah pihak kemudian dilanjutkan kembali pada 14-16 Oktober 2014 di Wina. Para pejabat mengatakan bahwa mereka tetap fokus untuk mencapai kesepakatan dengan tenggat waktu pada 24 November 2014. Pada 9 November 2015 Menlu Jafad Zarif bertemu dengan John Kerry di Muscat, Oman untuk membicarakan jalannya perundingan yang akan berlangsung pada 18-24 nanti, dalam pertemuan ini juga

dihadiri oleh ketua negosiator dari Kelompok P5+1 yaitu Catherine Ashton.

Delegasi Pemerintah Iran bertemu kembali dengan delegasi P5+1 pada 18-24 November di Wina untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan komprehensif. Setelah berlangsungnya perundingan ini Pemerintah Iran dan Kelompok P5+1 mengumumkan bahwa negosiasi akan diperpanjang untuk mencapai kemajuan pada isu-isu sulit dan kedua belah meyakini akan mencapai kesepakatan pada bulan Maret 2015. Dengan semakin baiknya kesepakatan diantara kedua belah pihak ini semakin memantapkan langkah Iran untuk segera menyelesaikan permasalahan nuklirnya yang ditentang oleh barat.

Pembicaraan antara kelompok P5+1 dan Pemerintah Iran dilanjutkan kembali di Jenewa pada bulan Januari 2015. Departemen Luar Negeri Amerika menyampaikan bahwa pembicaraan yang dilakukan antara Iran dengan P5+1 semakin baik. Kedua pihak berencana untuk bertemu kembali pada bulan Januari 2015. Untuk menguatkan kepercayaan di kedua belah pihak Menlu Javad Zarif mengirimkan surat kepercayaan kepada setiap delegasi yang berisi Iran memiliki tujuan tetap untuk mencapai kesepakatan nuklir komprehensif dan menjamin program nuklir Iran benar-benar dijalankan untuk kepentingan nasionalnya secara damai.

Perundingan untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran kembali dijalankan oleh masing-masing delegasi. Pertemuan antara perwakilan Iran dengan kelompok P5+1 dilakukan pada 15-18 Januari 2015 bertempat di Jenewa. Pertemuan ini membicarakan tentang program nuklir Iran dan membahas pedoman maupun instruksi yang diperlukan bagi tim negosiasi yang akan melakukan pertemuan kembali di Wina, Austria. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan sebelum akhir Juni.

Keseriusan masing-masing perwakilan untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan nuklir yang dikembangkan Iran semakin membuat kemajuan penting dalam proses negosiasi. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Iran secara kooperatif patuh dan memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati dalam

perjanjian-perjanjian sebelumnya semakin mendapatkan apresiasi bagi pihak barat. Perundingan antara 6 negara yang tergabung dalam kelompok P5+1 kembali dilakukan pada bulan Maret 2015 bertempat di Lausanne, Swiss. Negosiasi yang mempertemukan antara pejabat tinggi kedua belah pihak mulai menunjukan kejelasan bagi proses kesepakatan nuklir Iran sebelum batas akhir pencapaian kesepakatan yang ditentukan pada 31 Maret.

Melalui negosiasi ini masing-masing pihak masih membawa tuntutan untuk segera disepakati dalam perundingan ini. Dalam perundingan ini Pemerintah Iran kembali menyakinkan kelompok P5+1 bahwa Iran tidak memiliki keinginan mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan militer yaitu pembuatan bom atom, Menlu Zarif juga menyampaikan keinginan dari pemimpin besar Iran Ali Khamenei untuk meminta Barat segera mencabut sanksi-sanksi internasional dan embargo yang dijatuhkan kepada pemerintah Iran akibat dikembangkannya nuklir. Dalam perundingan ini kelompok P5+1 meminta Iran untuk mengurangi pengayaan mesin sentrifugal yang dijalankan Iran dibawah tanah yaitu pabrik Fordow, kelompok P5+1 juga meminta Iran untuk mengurangi lagi mesin sentrifugalnya yang dimilikinya.

Perundingan antara Pemerintah Iran dan kelompok P5+1 akhirnya menunjukkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak pada 2 April 2015. Perundingan yang panjang dibulan Maret membuahkan terobosan baru dalam sejarah perkembangan program nuklir Iran, melalui pernyataan bersama antara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dan Menlu Iran Javad Zarif menyatakan kedua belah pihak telah menyepakati sebuah hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak barat berjanji akan melongarkan sanksi ekonominya Iran dan diizinkan untuk mengembangkan nuklir untuk kepentingan nasionalnya yaitu pemenuhan energi bahkan, Iran dilarang untuk membangun pabrik pengayaan uranium yang baru.

Kesepakatan yang dicapai antara Iran dengan Kelompok P5+1 pada bulan April sebenarnya sudah memberikan kemajuan yang baik dalam penyelesaian nuklir Iran,

belum tercapainya kesepakatan yang lebih inti yaitu bagi barat menginginkan penghentian program nuklir Iran secara permanen dan bagi Iran meminta Barat untuk mencabut seluruh sanksi-sanksinya terhadap Iran. Walaupun belum adanya kesepakatan yang tercapai masing-masing delegasi telah menunjukan komitmennya dengan melakukan perundingan dan mau melaksanakan hasil dari perundingan yang dicapai. Dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan nuklir semakin membuat pemerintah Iran yakin akan mencapai kesepakatan terbaik atas program nuklirnya yang selama ini tidak ada kejelasan. Perundingan nuklir Iran kembali dijalankan pada bulan Juli 2015. Kedua delegasi bertemu di Wina, Austria untuk menyelesaikan pembahasan mereka mengenai program nuklir Iran. Dalam perundingan ini kelompok P5+1 meminta Iran untuk membatasi program nuklir sehingga tidak akan digunakan untuk membangun senjata nuklir. Perundingan ini sebenarnya telah melewati batasan waktu yang telah ditetapkan pada bulan april.

Keseriusan Pemerintah Iran untuk segera menyelesaikan permasalahan nuklirnya kembali dibuktikan dengan menjalin diplomasi dengan kelompok P5+1. Pemerintah Iran bertemu kelompok P5+1 di Wina, Austria pada 14 Juli 2015 untuk bernegosiasi kembali. Dalam perundingan ini, masing-masing perwakilan masih membawa keinginan masing-masing mengenai permasalahan nuklir Iran. Pemerintah Iran meminta barat untuk segera mencabut sanksi yang dijatuhkannya dan Iran berjanji akan menghentikan kegiatan nuklirnya dan berjanji akan bersikap kooperatif terhadap IAEA. Dalam perundingan ini akhirnya disepakati mengenai rencana Aksi bersama secara komprehensif yang disebut *denga Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Kesepakatan antara Pemerintah Iran dan 6 kekuatan Barat ini merupakan kesepakatan yang bersejarah bagi rakyat Iran khususnya Pemerintahan Rouhani setelah tidak adanya titik temu kesepakatan yang menguntungkan selama berpuluhan tahun dijalankannya program nuklir Iran.

Dengan disepakatinya JCPOA Pemerintah Iran akan bersedia untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan jangka waktu lama di berbagai pabrik

tenaga nukir yang dimiliki Iran antara lain Bushehr, Isfahan, Natanz, Arak dan Fordo, tambang uranium di Gachin dan pusat penelitian dan pengembangan kompleks militer di Parchin. Pemerintah Iran juga mempersilahkan IAEA untuk melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap kegiatan nuklir Iran, bahkan Pemerintah Iran berjanji akan mengurangi produksi uraniumnya dan mesin sentrifugal yang dimilikinya selama jangka waktu 15 tahun, Pemerintah Iran dilarang memperkaya dan menumpuk uranium melebihi 3,6%, Iran juga dilarang untuk membangun fasilitas pengayaan uranium yang baru. Dengan disetujuinya kesepakatan JCPOA ini maka pihak barat akan segera mencabut sanksi-sanksi terhadap Pemerintah Iran, bahkan Iran akan mendapatkan bantuan dana dan pemulihan aset-aset yang dibekukan oleh Barat.

Program nuklir Iran telah dikembangkan sejak pemerintahan Syah Mohammad Reza Pahlevi hingga berlangsung sampai saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Iran serius untuk memiliki teknologi nuklir bagi kepentingan nasionalnya, melalui nuklir Iran berharap keamanan dan kesejahteraan rakyatnya dapat terjamin. Dengan adanya pergantian pemimpin, pemerintah Iran tetap menempatkan program nuklir sebagai alat perjuangan yang harus dilindungi dan dijaga. Bagi rakyat Iran nuklir adalah sebuah jawaban atas kebutuhan energi mereka dimasa depan melalui program nuklir ini Pemerintah Iran memiliki keinginan untuk menjadikan nuklir sebagai alat tawar dalam politik internasional.

Dengan jatuhnya sanksi dan embargo yang diberikan oleh barat dan dengan disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB semakin menyudutkan Iran yang menyebabkan perekonomian Iran terpuruk. Untuk memulihkan perekonomian Iran maka Presiden Hassan Rouhani menyiapkan sebuah gebrakan nyata dalam memperbaiki perekonomian Iran. Untuk menjalankan keinginan Hassan Rouhani, pemerintah Iran menjalin komunikasi dengan Barat untuk bernegosiasi menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Dengan sikap terbuka dan kooperatif Pemerintah Iran memulai perundingan dengan 6 kekuatan besar dunia yang tergabung dalam kelompok P5+1 yang beranggotakan

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman.

Dengan dilakukannya berbagai perundingan antara pihak Iran dan kelompok P5+1 semakin menunjukkan bukti diplomasi yang efektif dari Iran dalam menghadapi tekanan internasional. Presiden Hassan Rouhani menekankan untuk menyelesaikan segala permasalahan haruslah menggunakan jalan diplomasi tanpa menggunakan kekerasan bahkan dengan menjatuhkan sanksi. Dengan membuka kembali komunikasi dan bersikap kooperatif, Pemerintah Iran masa Presiden Hassan Rouhani menunjukkan kekuatan diplomasi Iran kepada internasional. Melalui diplomasi multilateral yang dilakukan dengan kelompok P5+1 semakin membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Melalui kesepakatan yang tercapai dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) membuktikan Iran mampu menghadapi tekanan barat tanpa perlu mengorbankan program nuklirnya bahkan dengan meyakinkan barat pemerintah Iran akan mendapatkan keuntungan melalui pencabutan sanksi-sanksi Internasional yang didapat Iran akibat dikembangkannya program nuklir.

Penutup

Program nuklir yang dikembangkan oleh pemerintah Iran memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional rakyat Iran yaitu pemanfaatan energi baru bagi kepentingan keamanan, ekonomi maupun memperkuat kedaulatan wilayah. Pengembangan nuklir yang dicapai oleh Pemerintah Iran menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Untuk menghentikan Iran dalam mengembangkan nuklirnya maka DK-PBB menjatuhkan sanksi melalui resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 dan 1929. Dengan jatuhnya sanksi internasional tersebut maka Pemerintah Iran melakukan upaya diplomasi dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman (P5+1) untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran dan meminta pencabutan sanksi. Dalam melaksanakan diplomasi multilateral Presiden Hassan Rouhani menunjukkan sikap: Pemerintah Iran akan tetap mengembangkan nuklirnya walaupun mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan

PBB, Pemerintah Iran masa Presiden Hassan Rouhani berupaya mencabut sanksi dari Dewan Keamanan PBB dengan melaksanakan diplomasi multilateral dengan kelompok P5+1. Dengan dicapainya kesepakatan antara Iran dengan P5+1 membuktikan bahwa melalui diplomasi multilateral Iran mampu menyelesaikan permasalahan nuklirnya dengan menyetujui JCPOA. Dengan adanya berbagai perundingan nuklir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Iran dengan kelompok P5+1 membuktikan bahwa Pemerintahan Hassan Rouhani berupaya secara aktif untuk terlepas dari sanksi Dewan Keamanan PBB dengan melaksanakan negosiasi dan diplomasi.

Daftar Pustaka

- Alexander, Yonah dan Milton Hoenig. 2008. *The New Iranian Leadership "Ahmadinejad, Terrorism, Nuclear Ambition, And The Middle East"*. London: Praeger Security Internasional.
- Ansari, Ali M. 2000. *Supremasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta. UI Press
- Rahman, Mushafa Abd. 2003. *Iran Pasca Revolusi, Fenomena Pertarungan kubu Revormis dan Konservatif*. Jakarta. Kompas.
- Rajagopalan, R.J dan Arka Biswas. 2015. *Iran Nuclear Deal : Implication of the Framework Agreement*. New Delhi: Global Policy Journal and Observer Research Foundation.